



## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WISATA KAMPUNG BOJONG HONJE, DESA CIBUNTU, KECAMATAN WANAYASA, KABUPATEN PURWAKARTA**

**Arief Muhaemin<sup>1)</sup>**

1) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini menelaah praktik collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Bojong Honje, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk menilai kerja sama lintas sektor. Penelitian berfokus pada lima indikator proses kolaborasi: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan pencapaian hasil sementara. Temuan menunjukkan bahwa dialog tatap muka belum optimal karena frekuensi forum publik minim dan aksesibilitas terbatas, sehingga peran aktor dalam tata kelola kolaboratif kurang merata. Pembangunan kepercayaan bergantung pada frekuensi pertemuan dan kualitas komunikasi yang terbuka serta tindakan nyata, sedangkan komitmen terlihat dari konsistensi pelaksanaan tanggung jawab aktor. Berbagi pemahaman dipengaruhi oleh kapasitas pengetahuan, tingkat pendidikan, dan konteks sosial, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan klarifikasi tujuan bersama. Hasil sementara menjadi tolok ukur keberhasilan keputusan kolektif; mencapai hasil tersebut memerlukan integrasi tujuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan frekuensi pertemuan. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme forum publik yang mudah diakses, pelatihan kapasitas bagi pelaku lokal, evaluasi berkala, dan strategi pendanaan berkelanjutan untuk memastikan kesinambungan pengembangan pariwisata komunitas. Implementasi rekomendasi memerlukan dukungan lintas tingkat pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat lokal secara berkelanjutan bersama.

**Kata Kunci:** *Collaborative governance*, Pariwisata berbasis komunitas, Desa wisata, Forum dialog publik

### **Abstract**

*This study examines the practice of collaborative governance in the development of community-based tourism in Kampung Bojong Honje, Cibuntu Village, Wanayasa District, Purwakarta Regency. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and document analysis to assess the extent of cross-sector collaboration. The analysis*

*focuses on five indicators of the collaborative process: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and the achievement of interim outcomes. The findings indicate that face-to-face dialogue has not been optimally implemented due to the low frequency of public forums and limited accessibility for local communities, resulting in uneven actor participation within the collaborative governance structure. Trust building is influenced by meeting frequency, the quality of open and participatory communication, and the presence of tangible collective actions. Commitment to the process is reflected in the consistency with which actors carry out agreed responsibilities, affecting the effectiveness and efficiency of policy implementation. Shared understanding is shaped by differences in knowledge capacity, educational background, and social context, highlighting the importance of capacity building and continuous clarification of common goals. Interim outcomes serve as benchmarks for collective decision-making success and require aligned objectives, strengthened human resource capacity, and more frequent interactions. The study recommends strengthening accessible public forums, enhancing local actor capacity through training, conducting periodic evaluations, and developing sustainable funding strategies to ensure the long-term sustainability of community-based tourism development.*

**Keywords:** Collaborative governance, Community-based tourism, Tourism villages, Public dialogue forums

## **PENDAHULUAN**

Pendekatan *collaborative governance* hadir berdasarkan suatu fenomena yang ditemukan di era paradigma lama. Di era paradigma lama, pemerintahan kerap dilihat sebagai entitas yang sentral terhadap pejabat serta proses administratif formal. Namun demikian, perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* yang menitikberatkan kepada tata kelola yang efisien menempuh kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk dapat menangani berbagai persoalan tersebut. Oleh karenanya *collaborative governance* hadir sebagai pendekatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kolaborasi yang merupakan solusi ideal dalam menangani persoalan pada sektor pariwisata dengan melibatkan proses kerja antar dua pihak atau lebih, hal ini bermaksud supaya target yang akan diperoleh dapat dengan mudah disebabkan kontribusi berbagai pihak dalam kegiatan tersebut. Lebih lanjut lagi, proses pelaksanaan *collaborative governance* diperlukannya komitmen dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

*Collaborative governance* di negara Indonesia, diwujudkan dalam melaksanakan pengembangan serta pengelolaan pada sektor pariwisata yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kerja sama lintas sektor baik pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah begitupun

sebaliknya. Berdasarkan pernyataan (Kementerian Pariwisata RI, 2025), kolaborasi ini berkenaan dengan penyelarasan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata. Dengan mengidentifikasi keterlibatan berbagai pihak dan pembangunan kawasan wisata, kolaborasi sumber daya dan kolaborasi yang dimulai oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa (Dewi, 2013). Dengan demikian, dilakukannya kolaborasi lintas sektor menerangkan adanya keseriusan dan komitmen dari pemerintah dalam mengembangkan sektor yang lebih baik dan dapat dirasakan dampaknya untuk kemaslahatan masyarakat. Kegiatan pada sektor pariwisata sudah dilandasi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik pada tingkat pusat maupun daerah, salah satu kebijakan yang menjadi fondasi sektor pariwisata dengan melalui penetapan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada Kebijakan tersebut menjadi landasan utama pemerintah untuk menjalankan pengembangan serta pengelolaan pariwisata terutama dalam menjalankan *collaborative governance* melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor. Pada implementasi kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penetapan dokumen arah pembangunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA).

Menurut Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini (dalam Shanti, 2025), “Keberhasilan pelaksanaan RIPPARNAS tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan sinergi pemerintah daerah. Sinkronisasi dengan RIPPARDA menjadi kunci agar arah pembangunan pariwisata berjalan efektif di lapangan“ hal ini menegaskan, bahwasannya kebijakan antara pusat dan daerah perlu memiliki kesamaan fokus baik substansi maupun situasi dan kondisi yang relevan saat ini yang mana dengan adanya kesamaan fokus kebijakan akan berlangsung dengan optimal dan tidak adanya tumpang tindih kebijakan. Dalam menyelaraskan dengan kondisi dan situasi saat ini yang semakin kompleks, substansi pada kebijakan perlu diselaraskan sehingga memiliki relevansi dengan eranya. Pemerintah Pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI) melakukan rapat paripurna yang bertujuan dalam menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Merujuk kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan serta layanan publik kepada masyarakat merupakan hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah yang terdesentralisasi.

Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah di Indonesia yang menekankan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan daerah, hal ini dikarenakan Kabupaten Purwakarta memiliki potensi kekayaan alam, budaya, dan sosial yang dapat dijadikan destinasi wisata. Kabupaten Purwakarta sendiri memiliki 11 desa wisata yang sudah tergabung dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata RI (Sumber : Kemenpar, 2025). Desa wisata di Kabupaten Purwakarta tersebut masuk ke dalam beberapa kategori yang berbeda sesuai dengan indikator kriteria yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2023 tentang desa wisata yang diantaranya terdapat Desa Wisata rintisan, Desa Wisata berkembang, Desa Wisata Maju, dan Desa Wisata Mandiri.

Salah satu desa wisata yang masuk ke dalam kategori desa wisata rintisan yaitu Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Bersumber pada informasi (Jejaring Desa Wisata 2025), Desa Cibuntu merupakan desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dengan memiliki topografi wilayah yang berbukit dengan ketinggian  $\pm 650$  meter diatas permukaan laut. Desa Cibuntu sudah melakukan kolaborasi lintas sektor dalam hal pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Hal ini dibuktikan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menerangkan, bahwasanya upaya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan desa wisata sudah dilakukan, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah sudah menjalin koordinasi dengan pemerintah Desa Cibuntu untuk melaksanakan program-program pengembangan desa wisata baik dalam aspek SDM, infrastruktur, dan pemasaran (D. K. Purwakarta, 2024). Selain kolaborasi dengan pemerintah daerah, Desa Wisata Cibuntu juga sudah menjalin koordinasi dengan

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat untuk dapat membantu pelaksanaan pengembangan desa wisata dengan menjadi katalisator bagi desa. Pada entitas akademisi (dalam Hakiki, 2023), Desa Wisata Cibuntu sudah pernah menjadi *locus* Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa/i Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di mana mahasiswa/i terlibat dalam membantu pengembangan desa wisata melalui ide-ide serta gagasan-gagasannya.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dan bersumber dari sebagian informasi yang didapatkan oleh peneliti dari artikel, aktivasi media sosial desa tersebut dan keterangan wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke Desa Cibuntu, menemukan terdapat masih belum optimal pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Cibuntu. Temuan-temuan masalah meliputi: Pertama, minimnya kolaborasi dengan mitra strategis lainnya. Kedua, SDM desa yang belum siap. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pengembangan pariwisata. Keempat, kolaborasi yang kurang optimal. Kelima, keterbatasan infrastruktur.

Menurut penelitian (Andriyanto et al., 2024) *collaborative governance* hanya dapat dicapai dengan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) dengan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut (Ansell & Gash, 2007), *collaborative governance* merupakan suatu pendekatan baru dalam sistem tata kelola pemerintahan yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses konsensus. Tujuan utama dari proses tersebut adalah untuk merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik, serta mengelola program dan aset publik secara bersama.

Model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash mencakup beberapa tahapan penting, yaitu: *Pertama*, Kondisi Awal (*Starting Condition*), Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*), Desain Institusional (*Institutional Design*) menurut Ansell dan Gash, *Keempat*, Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*) Dalam membangun proses kolaboratif yang efektif, terdapat beberapa tahapan penting, yaitu:

a) Dialog tatap muka (*Face to Face Dialogue*) menjadi dasar untuk membangun komunikasi langsung dan pemahaman awal antar pihak.

b) Membangun kepercayaan (*Trust Building*) menciptakan rasa saling percaya agar setiap pihak merasa aman dalam bekerja sama.

c) Komitmen terhadap proses (*Commitment to Process*) memastikan semua pihak terlibat secara konsisten dan aktif.

d) Pemahaman bersama (*Shared Understanding*) menyatukan persepsi dan tujuan dari berbagai pihak yang terlibat.

e) Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*) menjadi capaian-capaian awal yang dapat memperkuat motivasi dan keberlanjutan kolaborasi ke tahap berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini akan mengelaborasi suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan landasan teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, 2007 terutama pada dimensi proses kolaborasi dengan kelima aspeknya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam *collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Desa Wisata Kampung Bojong Honje, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Teori yang digunakan Ansell & Gash (2007) pada aspek proses kolaborasi dengan kelima dimensi yaitu, Dialog tatap muka (*Face to Face Dialogue*), Membangun kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen terhadap proses (*Commitment to Process*), Pemahaman bersama (*Shared Understanding*), dan Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan teknik.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta. Lokasi penelitian berada di Jl. Wanayasa-Bojong, Sawit, Cibuntu, Kec. Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41174 dan Jl. Purnawarman Barat No. 2, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41112. Pemilihan *locus* bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjangkau objek yang menjadi fokus penelitian. Di samping itu, *locus* yang tepat juga membantu dalam mengambil data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Selaras dengan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan pada sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, pendekatan-pendekatan kerja sama lintas sektor melalui *collaborative governance* merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang dituangkan ke dalam konsep desa wisata. Pada hierarki kebijakan di tingkat nasional, konsep desa wisata ditetapkan menjadi program unggulan pariwisata nasional pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2025-2045, di mana substansi kebijakan ini diturunkan kembali pada kebijakan di tingkat daerah terkhususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang DAERAH (RPJPD) 2025-2045. Di Kabupaten Purwakarta terdapat 11 desa wisata yang sudah terasosiasi dengan Jaringan Desa Wisata (Jadesta) yang merupakan *platform* Kementerian Pariwisata RI. Pada implementasinya, pengembangan serta pengelolaan desa wisata di Kabupaten Purwakarta sudah dilakukan melalui *collaborative governance* salah satunya Pemerintah Desa Cibuntu.

Pemerintah Desa Cibuntu sudah mewujudkan pendekatan-pendekatan kerja sama lintas sektor baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, akademisi, media, masyarakat lokal, serta sektor

swasta. Pelaksanaan *collaborative governance*, memungkinkan dapat membantu pengembangan serta pengelolaan pariwisata berbasis komunitas baik pada aspek kelembagaan, infrastruktur, maupun SDM yang dituangkan ke dalam beberapa program sosialisasi, edukasi, dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi pada praktiknya, *collaborative governance* belum terbilang memberikan hasil yang optimal hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai hambatan yang terjadi baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh minimnya kolaborasi dengan mitra strategis lainnya, SDM di Desa yang belum siap, kurangnya kesadaran akan pengembangan pariwisata, pelaksanaan kolaborasi yang berjalan kurang optimal, serta keterbatasan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata Kampung Bojong Honje, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pendekatan penelitian ini akan merujuk pada indikator *collaborative process* yang diterangkan oleh Ansel & Gash.

### **1. *Face to face dialogue* (Dialog tatap muka)**

Pelaksanaan dialog tatap muka dalam *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata Kampung Bojong Honje, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta diwujudkan melalui forum dialog publik formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah daerah yang menaungi sektor pariwisata. Forum dialog publik merupakan suatu kegiatan yang niscaya akan dilakukan dalam melaksanakan suatu proses kolaboratif pada penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap sektor salah satunya yang dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas. forum dialog publik yang berkenaan dengan dialog tatap muka diselenggarakan dalam dua skema yaitu forum dialog publik formal serta forum dialog publik informal.

Forum dialog publik formal kerap kali dikenal dengan istilah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Forum ini ditandai dengan agenda rutin dengan struktur yang ketat, aturan protokoler yang jelas, dan bahasa yang baku. Umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan, presentasi resmi, dan pertemuan tingkat tinggi. Pelaksanaan forum dialog publik formal dalam pengembangan pariwisata pada umumnya diselenggarakan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Di samping itu, forum dialog publik informal dicirikan dengan Dialog yang lebih santai, fleksibel, dan terbuka untuk partisipasi yang lebih luas tanpa batasan protokoler yang ketat. Forum ini sering digunakan untuk mengumpulkan pandangan awal, membangun konsensus komunitas, atau sekadar berbagi informasi. Penyelenggaraan forum dialog publik informal dalam pengembangan pariwisata diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan peneliti menganalisis bahwa setiap entitas mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kaitannya dalam dialog tatap muka, di Desa Cibuntu diselenggarakan ke dalam dua skema yaitu, pertama forum dialog publik formal yang kerap kali dikenal dengan istilah Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), forum ini diselenggarakan setiap tahun sekali karena memiliki linimasanya tersendiri menyesuaikan dengan pembentukan dokumen Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes). Kedua forum dialog publik informal yang diselenggarakan secara tentatif, forum ini biasanya membahas hal-hal yang menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Pada wawancara di atas juga menerangkan, antara pemerintah desa dengan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memberikan pernyataan yang berbeda. dialog tatap muka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cibuntu masih belum menghasilkan keputusan-keputusan dengan baik hal ini karena pelaksanaannya yang masih belum dilakukan dengan frekuensi yang intens serta tingkat kehadiran masyarakat yang belum

konsisten, berbeda dengan dialog tatap muka yang diselenggarakan oleh Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang lebih rutin dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada dimensi dialog tatap muka yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Cibuntu serta kelompok sadar wisata merupakan salah satu wujud dari pemberian ruang-ruang demokrasi publik dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Sesuai dengan teori *collaborative governance* sebagai fasilitator forum dialog publik, tentu diperlukan kemudahan aksesibilitas, ruang partisipasi, dan frekuensi yang intens. Namun terdapat ketidakselarasan antara teori dengan hasil temuan di *locus* penelitian, diantaranya seperti kesulitan untuk menjangkau lokasi pelaksanaan forum dialog publik terkhususnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa, selain itu minimnya pelaksanaan forum dialog publik yang memengaruhi Faktor tersebut akan memengaruhi keberlangsungan forum dialog publik secara efektif maupun tidak. Oleh karena itu untuk menangani permasalahan tersebut dimulai dari keterlibatan seluruh entitas yang akan melaksanakan forum dialog publik terutama pemerintah desa perlu melakukan frekuensi dengan intensitas pelaksanaan yang lebih sering pada forum informal serta lokasi pelaksanaan forum yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat.

## **2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Keberlangsungan proses kolaborasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu elemen yang krusial karena akan menentukan keberhasilan pelaksanaan proses kolaborasi adalah kemampuan antar aktor dalam membangun kepercayaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa aktor dalam pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Cibuntu, sangat dipengaruhi oleh proses membangun kepercayaan antar entitas yang terhimpun. Sehingga proses kolaborasi akan berlangsung sesuai dengan sikap saling menghargai perbedaan pandangan yang tujuannya untuk kepentingan bersama. *Trust building* (membangun kepercayaan) merupakan faktor penentu dalam keberlanjutan

*collaborative governance*. Hal ini sesuai teori Ansell & Gash yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan proses kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan antar aktor dalam pembentukan dan penguatan rasa saling percaya satu sama lain. Dalam hal ini, setiap aktor perlu menciptakan hubungan yang solid dan saling mendukung supaya proses kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Secara holistik peneliti menganalisis bahwa faktor kedekatan emosional antar entitas akan berdampak kepada terwujudnya sikap saling percaya. Kedekatan emosional tersebut dibentuk dari hasil tingkat frekuensi pertemuan yang rutin. Misalnya Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menerangkan selaku pihak yang secara rutin mengadakan forum dialog publik membuat indikator membangun kebersamaan dengan mudah dicapai, studi kasus dalam penyampaian keinginan masyarakat dapat dengan mudah diterima dan direalisasikan melalui penghimpunan aspirasi kepada Kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dari perspektif pelaku usaha juga menerangkan pencapaian membangun kebersamaan yang cukup baik, hal ini karena entitas pelaku usaha dapat membangun kedekatan emosional dengan warga melalui komunikasi yang saling menghargai. Selain itu, dari pihak pemerintah desa menerangkan, dalam mencapai membangun kebersamaan melalui diseminasi informasi program kerja, anggaran, serta pembagian peran sudah sangat cukup kami lakukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti perihal indikator membangun kepercayaan pada *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Desa Wisata Kampung Bojong Honje, bahwa adanya tantangan dan hambatan yang dipengaruhi oleh intensitas pertemuan yang belum tinggi memengaruhi dampak positif yang dapat dirasakan oleh setiap entitas mengenai pengembangan pariwisata. Peralnya semakin minim intensitas pertemuan, maka kedekatan antar pihak pemangku kepentingan tidak akan terbangun yang berdampak kepada sikap saling menghargai yang tidak akan terwujud dengan baik. Akan tetapi pada saat forum pertemuan berlangsung, seluruh entitas dapat menerima adanya perbedaan pandangan dalam proses

pengambilan keputusan, salah satunya ialah pada saat adanya perbedaan urgensi pengembangan pariwisata antara pembangunan fasilitas pendukung di rumah warga dengan fasilitas infrastruktur jalan. Namun dengan penyampaian informasi secara transparan maka ditetapkan keputusan bersama.

### **3. *Commitment to process* (Komitmen terhadap proses)**

Komitmen terhadap proses pada proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas dapat memengaruhi keberhasilan suatu hubungan dalam mengimplementasikan program pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Indikator ini akan menjadi kunci dalam proses kolaborasi. Hal ini karena, komitmen dibangun di atas dasar kepercayaan, akibatnya komitmen akan terbangun, secara eksplisit menandakan bahwa indikator membangun kepercayaan telah berjalan dengan ideal. Menurut teori Ansell & Gash, agar komitmen terwujud maka dibutuhkan motivasi yang tinggi untuk berperan serta secara aktif dan kesediaan untuk menghormati dan melangsungkan hasil kesepakatan bersama. Di samping itu, komitmen akan semakin terbentuk jikalau timbul rasa saling ketergantungan satu sama lain untuk menggerakkan antar aktor dalam bekerja sama lebih akrab.

Pada implementasinya komitmen terhadap proses perlu memastikan semua entitas dapat berperan serta secara konsisten dan turut aktif dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan bersama yang diwujudkan mulai dari proses penetapan suatu program maupun kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, dimulai dari forum dialog publik yang menjadi langkah awal dalam menentukan arah pengembangan, yang mana konsistensi hadir dalam pertemuan para entitas menjadi aspek penting, selain itu pada saat forum dialog publik berlangsung sejauh mana partisipasi aktif setiap entitas. Di samping itu, pada tahapan implementasi program ataupun kebijakan sejauh mana hal tersebut dipatuhi oleh semua entitas serta korelasi hubungan dari satu entitas dengan entitas lainnya.

Secara kolektif peneliti menganalisis bahwa dalam menjalankan suatu program kerja belum dapat direalisasikan dengan baik, hal itu diterangkan pada setiap agenda forum dialog publik atau pelaksanaan program kerja masyarakat mengakui konsistensi kehadiran dan keinginan untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini belum dapat dilakukan dengan konsisten, hal itu karena latarbelakang masyarakat yang merasa perlu beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru terkhususnya yang berkaitan dengan teknologi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa terdapat kesenjangan antara konsistensi dan motivasi dari setiap entitas. Di mana minimnya penyelenggaraan pertemuan mengakibatkan rasa saling ketergantungan tidak terbangun dengan optimal. Di sisi lain, motivasi yang belum terbentuk memengaruhi komitmen yang tidak terwujud serta berdampak kepada tingkat partisipasi yang pasif. Sehingga proses kolaborasi tidak dapat mendorong kerja sama yang berorientasi kepada keputusan bersama.

#### **4. *Shared Understanding* (Berbagi pemahaman)**

Berdasarkan teori proses kolaborasi dalam berbagi pemahaman menurut Ansell & Gash, pada tahap ini seluruh entitas perlu mensinergikan persepsi dan tujuan bersama. Hal ini diwujudkan melalui ruang-ruang pertemuan maupun program-program mengenai pengembangan pariwisata. Di mana, seluruh entitas mewujudkan kesepakatan kolektif mengenai tujuan bersama, serta menitikberatkan krusialitasnya keselarasan visi dan persepsi di antara entitas yang berkolaborasi. Misalnya, tujuan bersama ialah untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas, yang mana dalam pengembangan suatu desa wisata maka diperlukan beberapa aspek seperti SDM, pengetahuan, inovasi, serta anggaran. Akan tetapi masyarakat desa belum memiliki aspek-aspek tersebut sehingga diperlukan kolaborasi dengan entitas lainnya agar meringankan serta menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Melalui program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di desa wisata, edukasi serta sosial sebagai wujud peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan promosi desa wisata melalui konten

media sosial. Program-program tersebut merupakan luaran (*output*) dari adanya forum dialog publik formal maupun informal.

Secara keseluruhan peneliti menganalisis bahwa dalam dimensi berbagi pemahaman, setiap entitas memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa, dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM dapat menunjang indikator desa wisata yang masuk ke dalam klasifikasi lebih tinggi, terlebih lagi adanya keinginan dari pemerintah desa serta Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengikuti kompetisi Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2026 yang terakhir diikuti pada tahun 2022. Dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Desa Cibuntu dapat mencapai indikator-indikator penilaian lainnya.

Menurut pelaksanaan observasi peneliti, bahwa dalam proses kolaborasi pada tahap berbagi pemahaman terdapat suatu kesenjangan persepsi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendidikan dan pengetahuan dari masing-masing entitas, walaupun tujuan bersamanya satu yaitu untuk menunjang desa wisata yang lebih baik seperti mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan pariwisata, mengikuti kompetisi desa wisata tingkat nasional, dan menjadi salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Purwakarta. Tantangan perbedaan persepsi tersebut merupakan suatu keniscayaan pada pelaksanaan *collaborative governance*, terlebih mayoritas masyarakat desa wisata yang sudah masuk ke dalam usia non produktif ditambah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat hanya tingkat Sekolah Dasar (SD) karena letak pemukiman yang jauh dari jenjang pendidikan lebih tinggi membuat masyarakat belum mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Oleh karena itu program edukasi yang berkenaan dengan pengembangan pariwisata tepat sasaran jika dilakukan namun kembali lagi dari frekuensi acara yang perlu diselenggarakan secara intensif. Sehingga memberikan pemahaman yang lebih berdampak antar entitas terkhususnya masyarakat desa.

##### **5. Intermediate Outcomes (Hasil sementara)**

Dalam pelaksanaan proses kolaborasi yang dimulai dari pertemuan tatap muka sampai dengan pemahaman bersama dalam menyelaraskan persepsi untuk suatu program yang akan dijalankan. Tentunya program-program yang dijalankan akan memberikan dampak dalam hal ini bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Berdasarkan hasil observasi peneliti, program-program yang dicanangkan ditetapkan pada suatu forum dialog publik terlebih dahulu yang nantinya disana akan ada proses dialog antar entitas untuk menentukan keputusan bersama yang biasanya dilakukan melalui skema pemilihan suara terbanyak. Beberapa program yang dicanangkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi serta promosi melalui digitalisasi. Program tersebut sudah terlaksana dan mampu memberikan hasil sementara yang akan berperan krusial dalam menetapkan keberhasilan *collaborative governance*.

Secara holistik peneliti menganalisis bahwa dalam dimensi hasil sementara, pelaksanaan *collaborative governance* sudah memberikan perubahan-perubahan kecil yang terlihat, terutama pada pembangunan infrastruktur, namun pada aspek peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa belum terlihat secara signifikan, hal itu dikarenakan latarbelakang pengetahuan masyarakat desa yang minim sehingga memerlukan proses adaptasi dengan waktu yang cukup lama, maka diperlukan adanya proses pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan dari antar entitas. Terlebih program-program yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini sudah direalisasikan akan tetapi konsistensi dan komitmen antar entitas belum berlangsung dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa untuk memperkuat proses kolaborasi, meningkatkan kepercayaan, serta memperdalam komitmen antar *stakeholders* maka diperlukan adanya pencapaian-pencapaian kecil yang dirasakan sebagai parameter sejauh mana kolaborasi berhasil dilaksanakan. Di desa ini, proses kolaborasi sudah dilaksanakan yang diawali dari adanya forum dialog publik sebagai ruang untuk pengambilan keputusan bersama yang nantinya dituangkan ke

dalam bentuk program-program pengembangan wisata dan peningkatan ekosistem perekonomian di desa. Sebagian entitas merasakan dampak yang sudah terlihat dari program-program tersebut dengan memberikan stimulus melalui edukasi serta sosialisasi, bekerja sama dalam memasok bahan dari komoditas unggulan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Namun seiring berjalannya waktu, kurangnya frekuensi pertemuan serta minimnya pembinaan terhadap masyarakat membuat program-program belum dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, latar belakang masyarakat serta entitas lainnya yang berbeda menjadi salah satu faktor terhambatnya keberlangsungan suatu program.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan Pemerintah Desa Cibuntu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selaku *stakeholders* sudah mewujudkan pendekatan-pendekatan kerja sama lintas sektor baik dengan entitas lainnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Desa Wisata Kampung Bojong Honje telah memberikan perubahan-perubahan kecil mulai dari peningkatan infrastruktur dasar, aspek kelembagaan, serta kapasitas Sumber Daya Manusia, namun pelaksanaan ini masih diiringi tantangan-tantangan yang menghambat implementasi suatu program maupun kebijakan. Ini menunjukkan perlunya tujuan bersama yang secara konsisten dapat diwujudkan melalui pertemuan dengan frekuensi yang intens, pengawasan dari pemangku kepentingan, serta pembinaan bagi masyarakat desa guna untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi secara utuh antara arah strategis, kompetensi sdm, dan tindakan nyata.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Bojong Honje, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka merupakan titik awal yang krusial dalam proses kolaborasi dijalankan dalam skema formal seperti Musrenbangdes dan skema informal yang diinisiasi oleh Pokdarwis namun efektivitasnya belum optimal karena partisipasi masyarakat dan beberapa entitas masih rendah, forum sering didominasi oleh segelintir aktor, dan aksesibilitas serta frekuensi pertemuan menentukan tingkat keterlibatan. Forum informal yang rutin dan bergilir terbukti lebih mampu membangun kedekatan dan meningkatkan partisipasi, sedangkan frekuensi pertemuan formal yang rendah serta minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam forum informal menghambat penyebaran kepercayaan dan komitmen secara merata.

Keberhasilan *trust building* yang dicapai melalui kegiatan nyata misalnya pembangunan MCK, saluran air bersih pada sejumlah rumah, dan kesepakatan mekanisme pasokan antara pelaku usaha dan warga menunjukkan bahwa hasil konkret mempercepat pembentukan kepercayaan; namun komitmen terhadap proses masih rapuh karena pertemuan yang jarang, lokasi forum yang tidak ramah bagi warga, keterbatasan kapasitas dan motivasi penduduk, serta dominasi beberapa aktor sehingga banyak program bersifat *ad-hoc* atau tidak terealisasi. Selain itu, perbedaan persepsi antar-aktor mengenai prioritas pembangunan misalnya warga yang mengutamakan perbaikan jalan, sementara pemangku kepentingan lain menekankan pembangunan MCK atau *homestay* sering membuat inisiatif berakhir sebagai formalitas tanpa kesinambungan, meskipun ada pencapaian sementara seperti paket wisata, peningkatan sarana-prasarana, kolaborasi hilirisasi komoditas, dan promosi digital. Berdasarkan kondisi tersebut, saran yang diusulkan meliputi langkah-langkah praktis untuk memperkuat mekanisme *collaborative governance*.

Pertama, susun kombinasi jadwal pertemuan formal dan informal misalnya pertemuan formal triwulan untuk keputusan strategis dan pertemuan informal mingguan atau dua mingguan yang bergilir di rumah warga serta siapkan pedoman tata laksana forum dan paket fasilitasi pelatihan bagi fasilitator netral. Kedua, tingkatkan transparansi dan kepastian pembagian manfaat melalui publikasi ringkasan rencana dan alokasi anggaran yang mudah dipahami, notulen yang dapat diakses publik, perjanjian sederhana antara pelaku usaha dan produsen lokal, serta formalitas kerja bersama seperti gotong-royongn atau proyek bersama sebagai bukti komitmen nyata. Ketiga, bangun mekanisme administratif dan insentif untuk memperkuat komitmen daftar hadir, notulen dengan tindak lanjut dan penanggung jawab, tenggat waktu, berita acara atau MoU desa dengan pokdarwis, serta penghargaan non-moneter atau insentif kecil untuk meningkatkan motivasi. Keempat, selaraskan pemahaman bersama melalui pendekatan komunikasi partisipatif seperti materi visual, lokakarya kelompok kecil, kunjungan percontohan, dan metode deliberatif seperti *world cafe* atau pemungutan suara prioritas sederhana agar prioritas pembangunan terumuskan kolektif. Kelima, rancang program sebagai pilot dengan indikator terukur, anggaran minimal, rencana pemeliharaan, dan pengintegrasian program pelatihan SDM ke dalam RKPDes dorong kemitraan dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk pembiayaan dan akses pasar. Terakhir, terapkan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi berkala misalnya evaluasi triwulan berbasis indikator sederhana untuk memastikan keberlanjutan, memperbaiki intervensi, dan mereplikasi program yang berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Andriyanto, G. A., Desa, P., Berbasis, W., Di, B., & Sitiwinangun, D. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon*. How to cite : Gian Anggraeni Andriyanto , dkk , “ Collaborative Governance Dalam Jamblang Kabupaten Cirebon ”, *BELEID : Journal Of Administrative Law And Public*. 2(1), 138–154.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory And Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*.
- Aulia, F. E., Subakti, I. A., Khoirini, I. L., Anggraeni, L. D., & Trisnawati, N. (2024). *Meninjau Penerapan Community-Based Tourism di Desa Wisata Karangrejo , Borobudur : Stakeholder Mapping Analysis*. 14(September), 176–188.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3, No. 2. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976.hal-2>.
- Febrian, R. A. (2016). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN ( Tinjauan Konsep dan Regulasi )*. II, 200–208.
- Hulu, R., & Aryaningtyas, A. T. (2024). *PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA DOPLANG : TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KPENINGKATAN EKONOMI LOKAL ( COMMUNITY-BASED TOURISM IN DOPLANG VILLAGE : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ENHANCING LOCAL ECONOMY )*. 05, 1
- Ketut, I. W. E. D. P. dan A. A. (2015). *Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata*. Universitas Udayana.
- Muhammad, N., Suaedi Falih, & Antun, M. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung Nusantara.
- Mulyana, A. (2023). Strategi Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi pada BPKPD Kota Banjar ). *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 160–180.

- Mulyana, A. (2023). Strategi Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi pada BPKPD Kota Banjar ). *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 160–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v1i3.734>
- Pakpahan, R., Dalam, K., Desa, P., & Nginggo, W. (2018). *Implementasi Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas Dalam Pengembangan Desa Wisata Nginggo Yogyakarta*. 5(1).
- Rizani, D. F., & Sabila, S. V. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pengembangan Desa Wisata Samirone Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (12), 138–152.
- Setia, B. I., Pangestu, E. S. R., Alghifari, E. S., & Hedy, R. (2025). *Revitalisasi Bojong Honje : Dari Potensi Tersembunyi Menuju Destinasi Wisata*. 7(1), 80–89.
- Sillahi, U., & Syafri, W. (2015). Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel. *In Ipdn Press*, 53(9).
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatanhambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik*, 5 : 2.
- Syahputra, H. D., & Syahputra, H. D. (2023). *Collaborative governance pengembangan wisata*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Zaenuri, M. (2016). *Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance( studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten seleman )*.

### **Buku**

- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, N., Suaedi Falih, & Antun, M. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung Nusantara.

- Pemerintah Desa Cibuntu. (2023). *Profil, Sejarah Desa Cibuntu*.
- Purwakarta, P. D. K. (2022). *Buku Profil Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Sedarmayanti. (2012). *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik.”* CV. Bandar Maju.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. SmartMedia.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata : Konsep dan Aplikasinya*. Gava Media.

### **Website**

- Hakiki, F. (2023). *Pelaksanaan Survei Mengenai Kondisi Kampung Wisata Bojong Honje oleh Mahasiswa KKN UPI*. Kompasiana.Com. [https://www.kompasiana.com/falikhinhakiki3488/64e4cc4418333e7e6a6a18a3/pelaksanaan-survei-mengenai-kondisi-kampung-wisata-bojong-honje-oleh-mahasiswa-kkn-upi?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompasiana.com/falikhinhakiki3488/64e4cc4418333e7e6a6a18a3/pelaksanaan-survei-mengenai-kondisi-kampung-wisata-bojong-honje-oleh-mahasiswa-kkn-upi?lgn_method=google&google_btn=onetap)
- Indonesia, B. D. dan S. I. (2025). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Mei 2025*. <https://kemenpar.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-mei-2025>
- Indonesia, B. K. K. P. R. (2025). *Kementerian Pariwisata Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Pariwisata Berkualitas sebagai Agenda Nasional*. Website Resmi Kemenpar RI. <https://kemenpar.go.id/berita/kementerian-pariwisata-perkuat-kolaborasi-lintas-sektor-wujudkan-pariwisata-berkualitas-sebagai-agenda-nasional>
- Indonesia, K. P. R. (2025). *Desa Wisata Cibuntu*. Jadesta.Kemenparekraf.Go.Id. [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kampung\\_bojong\\_honje](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kampung_bojong_honje)

Purwakarta, D. K. (2024). *Percepat Pembangunan Kawasan Pedesaan, Purwakarta Kembangkan Puluhan Desa Wisata*. Simedkom.Purwakartakab,Go.Id.

<https://simedkom.purwakartakab.go.id/news/detail/8KZUy8w/percepat-pembangunan-kawasan-pedesaan,-purwakarta-kembangkan-puluhan-desa-wisata>

Putri, D. L. (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan : Pariwisata oleh, dari dan untuk Masyarakat*. Combine Resource Institution. <https://www.combine.or.id/2017/01/06/pariwisata-berbasis-masyarakat-yang-berkelanjutan-pariwisata-oleh-dari-dan-untuk-masyarakat/>

Shanti, H. D. (2025). *Pemerintah selaraskan kebijakan pembangunan pariwisata*. Antaranews.Com.

<https://www.antaranews.com/berita/5212861/pemerintah-selaraskan-kebijakan-pembangunan-pariwisata>

Wisnubroto, K. (2025). *Geliat Sektor Pariwisata Pacu Pertumbuhan Ekonomi*. Portal Informasi Indonesia.

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9026/geliat-sektor-pariwisata-pacu-pertumbuhan-ekonomi>

### **Kebijakan**

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

Permenpar No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata